

DAMPAK DAN ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PEMULIHAN KASUS KERUSUHAN 98 PADA ETNIS TIONGHOA

Jiovanie Maria Margaret Munthe¹ & Sayyidah Rachmawati²

Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara

Email: jiovaniemaria@students.usu.ac.id, leanthurium@gmail.com

Abstract

After Indonesia gained independence, the country experienced numerous conflicts that generated controversy. The year 1998 remains one of the most unforgettable periods due to widespread riots that resulted in many casualties and targeted attacks against the ethnic Chinese community. The May 1998 riots constituted a bloody moment for Chinese Indonesians. This study aims to collect, analyze, and process information regarding the 1998 riots and their impact on the ethnic Chinese community, as well as to examine the communication strategies employed during the recovery phase. The method used in this study is a literature-based approach (library research). Data collection was conducted by reviewing and exploring various journals, books, and documents both printed and electronic as well as other data sources and information considered relevant to the study.

Keywords: Riots, Recovery, Ethnicity, Chinese Ethnic Community

Abstrak

Setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka, tidak sedikit mengalami konflik yang menimbulkan kontroversial. Tahun 1998 menjadi salah satu tahun yang tidak terlupakan akibat dari kerusuhan yang menimbulkan banyak korban dan memunculkan sebuah serangan yang ditujukan kepada etnis Tionghoa. Kerusuhan Mei 98 adalah momen berdarah bagi warga Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan mengolah informasi yang didapatkan mengenai kerusuhan 98 yang berdampak pada etnis tionghoa beserta analisis dari strategi komunikasi dalam tahapan pemulihan (*recovery*). Metode atau Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian.

Kata Kunci: Kerusuhan, Recovery, Etnis, Tionghoa

PENDAHULUAN

Dimulai dari 300 tahun sebelum masehi, etnis Tionghoa telah menginjakkan kaki di tanah Indonesia ini. pada awalnya mereka hanya singgah sebentar selama masa kunjungan berdagang yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Namun melihat keadaan wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam membuat etnis Tionghoa berdatangan serta

memutuskan menetap di Indonesia untuk memperoleh penghidupan yang lebih sejahtera, kedatangan mereka pun awalnya diterima baik oleh warga asli Indonesia. Namun di masa orde lama hubungan etnis Tionghoa dengan pribumi memburuk dikarenakan peristiwa G30S/PKI orang-orang Tionghoa di Indonesia dijadikan kambing hitam oleh pemerintah dengan dianggap sebagai komunis dikarenakan kedekatan PKI dengan RRC. Peristiwa tersebut menimbulkan perpecahan antara etnis Tionghoa dengan Pribumi yang menimbulkan rasa kebencian terhadap etnis Tionghoa.

Hingga pada masa awal orde baru sikap diskriminatif terhadap etnis Tionghoa semakin memburuk, karena dikeluarkannya instruksi presiden nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Dalam instruksi tersebut ditetapkan bahwa semua upacara agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup. Instruksi presiden tersebut bertujuan untuk melikuidasi pengaruh serta seluruh hal yang berkaitan dengan kebudayaan Tionghoa. Dampak stigma dan diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat etnis Tionghoa benar-benar menyedihkan, dengan diterbitkannya Inpres No.14 Tahun 1967 aktivitas keagamaan Konghucu semakin terdesak. Keadaan ini diperparah dengan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054/BA.01.2/4683/95 Keberadaan masyarakat Etnis Tionghoa semakin terpinggirkan.

Peristiwa kerusuhan Mei 98 menjadi puncak fase penderitaan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Dipicu oleh Krisis nilai tukar yang terjadi di Asia pada tahun 1997, dengan mendevaluasi mata uang Thailand, Bath. Dampaknya bagi negara Indonesia yaitu naiknya nilai rupiah yang berada pada kisaran Rp 2.600 pada periode tersebut mencapai Rp14.900. Krisis nilai tukar tersebut telah menyebabkan berbagai kesulitan ekonomi yang sangat parah. Serta terjadinya aksi unjuk rasa demo oleh mahasiswa Universitas Trisakti mengenai krisis moneter hingga penurunan Soeharto sebagai presiden Indonesia yang telah dilantik sebanyak tujuh kali. mengalami perpecahan dengan aparat keamanan, Yang menyebabkan tewasnya empat mahasiswa Trisakti. Tragedi ini pun memicu demonstrasi secara besar-besaran hampir diseluruh wilayah Indonesia. pada tanggal 13-15 Mei 98 merupakan peristiwa berdarah bagi etnis Tionghoa. Pada masa itu masyarakat etnis Tionghoa dikambing hitamkan oleh pemerintah karena dianggap sebagai penyebab dari krisis moneter tersebut. Sentimen ini menyebabkan etnis Tionghoa menjadi incaran kemarahan serta pelampiasan pribumi. Pada masa itu rumah, toko serta beberapa aset berharga milik orang Tionghoa dibakar dan dijarah.

Peristiwa Mei 98 adalah momen berdarah bagi warga Tionghoa. Karena sebuah kerusuhan besar anti Tionghoa selama dua hari terjadi di Jakarta dan Solo secara besar-besaran. Tragedi ini merupakan suatu bencana yang mungkin sulit dilupakan oleh warga Indonesia keturunan Cina. Pembantaian dan perlakuan pribumi yang buruk tersebut juga menimbulkan berbagai macam dampak negatif terhadap etnis Tionghoa, seperti terganggunya mental para etnis Tionghoa yang mengalami kekerasan dan pemerkosaan, ketakutan serta menyebabkan ratusan warga keturunan Cina tidak segan-segan meninggalkan Jakarta. Namun akibat perlakuan pribumi yang tidak wajar, pemerintah

akhirnya menerbitkan kebijakan baru serta menghapus peraturan yang dianggap diskriminatif setelah tumbang rezim orde baru dan beralih kepada zaman reformasi yang memberikan angin segar atau dampak positif bagi etnis Tionghoa.

Metode Penelitian

Metode atau Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3). Dalam melakukan pengumpulan materi melalui proses penganalisisan serta pengamatan data dengan memanfaatkan verifikasi dan reduksi data termasuk juga ringkasan akhir. Penganalisisan dan pengamatan data disini dilakukan untuk memilah data yang sesuai, lalu dilakukanlah reduksi data, reduksi data disini berarti mencatat data yang telah melalui proses penganalisisan serta pengamatan dengan teliti, kemudian data tersebut dirangkum sesuai dengan pokok yang dicari. Selanjutnya melakukan verifikasi data yang artinya data yang sudah ditampilkan atas dasar hasil dari penelitian tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan mengolah informasi yang didapatkan mengenai kerusuhan 98 yang berdampak pada etnis tionghoa beserta analisis dari strategi komunikasi dalam tahapan pemulihan (*recovery*) dan menjelaskan bagaimana tragedi etnis Tionghoa terjadi di Jakarta mulai dari latar belakang, bagaimana peristiwa itu terjadi, hingga dampak yang dirasakan sampai saat ini dari peristiwa 1998. Penelitian ini juga membahas tentang peran media massa serta pemerintah dalam mitigasi pasca bencana.

Kajian Pustaka

Bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (BNPB - UU NO. 24 Tahun 2007). Berdasarkan definisi tersebut, kerusuhan terhadap Etnis Tionghoa Mei 98 dapat dikategorikan sebagai sebuah bencana. Pada peristiwa tersebut, masyarakat Indonesia beretnis Tionghoa menjadi korban pemerkosaan, pembunuhan, serta menjadi korban atas kerugian harta benda dimana pada saat itu banyak rumah dan toko milik etnis Tionghoa yang dihancurkan dan dibakar. Tidak hanya dirugikan secara fisik dan materi, etnis Tionghoa juga dirugikan secara

psikologis dikarenakan adanya trauma yang timbul akibat peristiwa tersebut. Kami menggolongkan kerusuhan terhadap etnis Tionghoa 98 kedalam kategori bencana sosial karena peristiwa ini diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Kerusuhan 98 Terhadap Etnis Tionghoa

Kerusuhan yang terjadi terhadap etnis Tionghoa di Jakarta pada tahun 1998 menjadi suatu tragedi yang tidak pernah terlupakan dalam sejarah Indonesia. Pasalnya hal tersebut menimbulkan banyak kerugian terkhusus bagi orang-orang etnis Tionghoa. Tragedi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan bagi semua orang menjadi akibat dari stereotipe yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Jakarta. Tidak dipungkiri peristiwa ini didasari dari berbagai alasan yang melatar belakangi, hingga pada akhirnya kejadian ini meletus pada 13-15 Mei 1998.

Setelah memuncaknya aksi Kerusuhan Mei 98 berujung kepada aksi kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Aksi kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan seksual yang menitik beratkan perempuan etnis Tionghoa sebagai korban kekerasan. Hal ini dikarenakan perempuan dari golongan etnis dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan dan jika mengalami kekerasan seksual akan dianggap aib untuk menghancurkan kehormatan dari etnis tersebut.

Trauma yang melekat pada orang-orang Tionghoa Indonesia yang paling menyedihkan yaitu terjadinya pemerkosaan massal secara brutal terhadap perempuan Tionghoa di Indonesia. Menurut (Yosia, 2020) puluhan ribu perempuan etnis Tionghoa mengalami trauma terhadap kerusuhan pada Mei 1998 dan mereka melakukan penyelamatan diri. Penyelamatan diri ini yang kemudian disebut eksodus yaitu meninggalkan tempat tinggal yaitu Jakarta oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia dalam skala besar-besaran. Terjadinya kerusuhan seperti penjarahan, pembunuhan, perusakan, pembakaran pada 1998 ternyata dibarengi juga dengan pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa.



<https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-pada-mei-98-tak-boleh-disangkal/1661256.html>

(Anggota Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Pertahanan pada 1998, menuduh militer kurang bertindak mencegah pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998.)

Beberapa korban mengalami trauma baik secara fisik maupun mental. Trauma fisik yang dialami para korban secara umum adalah radang sendi, nyeri panggul kronis, masalah pencernaan, gejala pramenstruasi yang intens, kejang non-epilepsi, sedangkan trauma mental yang dialami para korban secara umum adalah Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) yang menyebabkan rasa takut, gangguan kecemasan, rasa marah, dan bersalah. Dalam beberapa kasus menurut catatan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) beberapa korban pasca kejadian mengalami trauma sehingga berakibat pada korban meninggal dunia, melakukan tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, menutup diri hingga harus pindah ke lokasi lainnya (pindah kota atau bahkan pindah negara).

Dampak lainnya dapat dilihat dari kerugian materi yang diterima oleh etnis tionghoa, kerugian dialami khususnya para pengusaha yang tokonya dirusak dan dijarah oleh massa, kebanyakan toko/bangunan yang dirusak oleh massa adalah toko milik pengusaha Tionghoa, toko yang sekaligus menjadi tempat tinggal mereka. Kejadian Mei 98 mungkin adalah kejadian yang tak akan pernah terlupakan oleh pengusaha etnis Tionghoa. toko yang sekaligus menjadi tempat tinggal mereka hancur dirusak massa, barang dagangan dan perabot rumah tangga ikut dirusak dan dijarah tentu menimbulkan dampak yang sangat besar bagi para pengusaha Tionghoa. Akibat kerusuhan ini, pengusaha etnis Tionghoa merugi dan harus bekerja keras untuk membangun kembali usahanya tersebut, mereka membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk membangun kembali usahanya. Atas kejadian ini orang-orang Tionghoa memilih untuk tidak meninggalkan wilayahnya, melainkan mereka tetap tinggal di kawasan petukangan untuk memulai usahanya kembali dari awal. Modal yang mereka gunakan untuk membangun kembali usahanya dengan menggunakan uang hasil penjualan yang sebelumnya mereka dapatkan, tabungan yang mereka miliki atau dengan melakukan peminjaman.

Analisis Recovery Kerusuhan 98

Para pengusaha Tionghoa kembali merintis usahanya masing masing dari awal. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk membangun usahanya, ada yang menggunakan uang tabungan untuk merenovasi bangunan dan membeli barang dagangan untuk dijual kembali, dan ada pula yang meminjam ke bank dengan jaminan surat kepemilikan bangunan mereka, bahkan ada juga yang merenovasi bangunannya secara bertahap dalam waktu kurun yang cukup lama sembari mengumpulkan dana dengan hasil berdagang.

Setelah Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden Indonesia, B.J Habibie sebagai Presiden Indonesia ketiga berketetapan hati untuk menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf atas kekerasan yang terutama dialami kaum perempuan dalam tragedi Mei 98. Hal tersebut dilakukan se usai berjumpa dengan para aktivis perempuan yang tergabung dalam Masyarakat Anti Kekerasan yang dipimpin Prof DR. Sapparinah Sadli pada tanggal 15 Juli 98. Dalam buku berjudul "Tragedi Mei 98 dan Lahirnya Komnas

Perempuan” yang ditulis oleh Dewi Anggraeni pada tahun 2014, secara runtut digambarkan kronologi pertemuan B.J. Habibie dengan para aktivis perempuan yang menyampaikan bukti terjadinya perkosaan massal dan serangan seksual terutama pada etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 98.

B.J. Habibie, yang tumbuh dewasa dan matang di Jerman dimana sejarah kekejaman Nazi menjadi memori publik, tentu saja secara spontan terpukul dan marah atas peristiwa tragis tersebut. Kemarahan inilah yang kemudian mendorongnya agar ada kebijakan dan institusi yang bekerja efektif untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan Indonesia. Momentum inilah yang menjadi inisiatif awal kelahiran Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Tetapi niat baik dari B.J. Habibie tidak terealisasi seperti yang diekspektasikan dan direncanakan. Temuan lapangan itu rupanya masih dinilai belum cukup. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa berkas penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional (KomNas) HAM dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena dianggap tidak memenuhi syarat penyidikan serta bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut. Tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak khususnya keluarga korban sehingga masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah lembaran hitam sejarah masyarakat yang belum usai. Tragedi Mei 98 dan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM lainnya akan tetap tinggal sebagai bagian dari sejarah kelam bangsa ini.

Pernyataan-pernyataan dari Timsus juga mengindikasikan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM kerusuhan 98 melalui jalur pengadilan masih berjalan di tempat. Padahal, rezim telah berganti lima kali selepas turunya Soeharto. Setiap rezim pun gagal menyelesaikan kasus ini. Nampaknya, bukan hanya sekedar janji politik yang dibutuhkan, tetapi juga keberanian dan komitmen dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menuntaskan permasalahan ini melalui jalur pengadilan.

Isu identitas nasional Tionghoa menemukan titik terang setelah pemerintah mengeluarkan Keppres No. 6 Tahun 2000, yang diumumkan pada 18 Januari 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan dicabutnya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Artinya, warga keturunan Tionghoa tidak lagi memerlukan izin khusus untuk mengungkapkan secara terbuka berbagai aspek terutama pada identitas, kepercayaan, budaya, dan tradisinya. Gus Dur atau K.H Abdurrahman Wahid memiliki peran penting dalam menangani kerusuhan 98. Ia mendahulukan pendekatan kemanusiaan untuk menyelesaikan sejumlah konflik.

Rasa marah B.J. Habibie pun sebenarnya belum tuntas dan menemukan jawabannya. Sembilan belas tahun kemudian, tepatnya Senin (8/5/2017), Habibie kembali menunjukkan atensi khusus terhadap tragedi Mei 98, khususnya kasus pemerkosaan massal. B.J. Habibie pun menanyakan kembali kelambanan penyelesaian kasus Tragedi Mei 98. B.J. Habibie kepada Komnas Perempuan bahkan meminta salinan dokumen-dokumen penyelidikan kasus Tragedi Mei 98 untuk diserahkan langsung ke Presiden Jokowi.

Periode Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf dan rekonsiliasi. Pemerintah mengadakan Rekonsiliasi (non yudisial) zaman presiden atau perdamaian secara nasional. Ternyata keluarga korban banyak yang tidak menerima keputusan pemerintah karena hanya sekedar permintaan maaf tanpa adanya bentuk keadilan bagi para keluarga korban dengan mengimplikasikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku yang akhirnya menggantung kasus ini dan membuat kasus ini tidak terselesaikan. Hal ini terlihat dari komentar-komentar yang berada pada media sosial dan media massa yang masih menggembar-gemborkan kasus ini. Terdapat juga pro dan kontra dari keluarga korban dalam penyelesaian kasus yang diberikan oleh pemerintah. Mereka juga meminta kompensasi dari kerugian yang mereka terima. Padahal rekonsiliasi bukan hanya menguntungkan sebelah pihak dan tidak kalah dengan sistem peradilan yudisial karena mekanismenya saling menguatkan. Alhasil, selama tidak ada titik temu di antara para pihak, penyelesaian kasus tragedi kerusuhan 98 ini sepertinya akan hanya menjadi wacana tak bertepi.

Mitigasi Pasca Bencana

1. Peran Pemerintah

Dalam menanggulangi kasus kerusuhan 98, pemerintah berperan sangat penting dalam menanggulangi permasalahan ini. Dilihat dari analisis *recovery*, pemerintah melakukan beberapa hal dalam tahapan mitigasi bencana, terutama beberapa kebijakan terkait asimilasi Tionghoa-Indonesia, seperti pada zaman Presiden B.J Habibie dikeluarkan Instruksi Presiden RI No.26 tahun 98 untuk membatalkan peraturan yang bersifat diskriminatif. Kemudian zaman Presiden Abdurrahman wahid menerbitkan Keppres No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Dengan Keppres ini, perayaan Konghucu tak perlu ijin khusus lagi. Pada zaman Presiden Megawati mulai ditetapkan Hari Raya Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional melalui Keppres RI No. 19 tahun 2002. Hingga Pada tahun 2008, Presiden SBY mengeluarkan UU tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Hingga pada saat ini, etnis Tionghoa sudah mulai menunjukkan eksistensinya dalam berbagai bidang pemerintahan, ekonomi-bisnis, bahkan politik. Hal ini menandai kemajuan positif dari diberlakukannya kebijakan asimilasi Tionghoa-Indonesia yang dimulai pada zaman B.J Habibie waktu itu.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah mengupayakan program pendidikan multikulturalisme sejak dini melalui lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal pada tiap siswa/anak didik dimulai dari yang lebih dini sehingga muncul/tertanamkan rasa toleransi terhadap keberagaman budaya, agar mampu menjadi pengikat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap saling menghargai, toleransi, mampu hidup bersama dalam keragaman adalah tujuan dari multikulturalisme, yang dapat dimiliki setiap insan melalui pendidikan multikultural. Selain itu, akan pula timbul pengakuan atas pluralisme budaya. Sebab pluralisme budaya bukan suatu pemberian (*given*), tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas

Kemudian dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang menimpa sebagian besar perempuan tionghoa pada saat itu, maka pemerintah sekaligus mengesahkan RUU-

PKS yang telah lama diajukan, sebagai bentuk perlawanan akan tindakan kekerasan seksual, yang juga akhir akhir ini menjadi *concern* di Indonesia.

2. Peran Media Massa

Kebebasan pers pada masa orde baru jauh dari kata bebas. Hal ini terbukti dari pemberitaan bias yang dilakukan oleh media massa atas permintaan dari pemerintah. Pada saat itu, setiap pemberitaan media massa harus melewati sensor dari departemen penerangan yang merupakan pengawal kebebasan pers pada masa itu. Pemerintah Orde Baru juga memulai propaganda yang disebut "jurnalisme pembangunan" pada pertengahan periode 1970-an. Jurnalisme harus dilandasi oleh ideologi Pancasila. Pemerintah mewajibkan wartawan berperan sebagai warga negara yang juga turut menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa Indonesia. Wartawan diharuskan mendukung setiap keputusan pemerintah melalui pemberitaan Pers pada masa Orde Baru ini disebut sebagai "Pers Pancasila" yang menerapkan prinsip bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan pers dibatasi dengan pengawasan pemerintah melalui Departemen Penerangan. Pemberitaan media pada saat itu lebih condong dalam pembentukan *framing* berupa provokasi yang mengarah kepada etnis tionghoa sebagai dalang utama dalam krisis moneter. Adapun beberapa media yang memaparkan pemberitaan objektif, seperti Majalah Tempo, Tabloid Detik dan Majalah Editor kemudian dibredel oleh pemerintah, karena dianggap sebagai ancaman.

Dalam menangani hal ini, pemerintah melakukan kebijakan untuk tahapan mitigasi pasca bencana berupa 'TAP MPR RI No. XXVII Tahun 98 tentang Hak Asasi Manusia' tentang Jaminan dan perlindungan dalam hal berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui media massa dan juga pembubaran Departemen Penerangan. Tepatnya pada masa B.J. Habibie SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) tidak lagi diberlakukan.

Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Kerusuhan 98

1. Menentukan tokoh/komunikator sebagai sumber yang kredibel
 - a. Momentum ini menjadi inisiatif B.J.Habibie menciptakan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS) sebagai tempat para korban menyuarakan dan menyampaikan bukti terjadinya pemerkosaan massal dan serangan seksual terutama pada etnis Tionghoa. B.J. Habibie juga menerbitkan beberapa Inpres (no. 26 Tahun 1999) untuk meminimalisir potensi diskriminasi pada kaum Tionghoa.
 - b. Pada masa periode pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ia mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang menyatakan telah mengembalikan HAM kepada kaum Tionghoa.
 - c. Pada periode Joko Widodo pemerintah menyampaikan permintaan maaf dan rekonsiliasi secara nasional dengan mengundang pihak pihak yang bertentangan untuk mencapai titik temu penyelesain kasus.

2. Dilakukannya *campaign*/sosialisasi oleh komunitas Tim Relawan untuk Kekerasan Terhadap Perempuan yang akan terus menyuarakan kejelasan kasus ini

PENUTUP

Kesimpulan

Berbagai kebijakan seperti asimilasi Tionghoa-Indonesia dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kasus kerusuhan 1998 yang mana kerusuhan ini berujung diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Untuk itu pemerintah dan media berperan dalam proses recovery hingga mitigasi pasca bencana kasus ini. Dimulai dari pembuatan kebijakan oleh pemerintah hingga yang terbaru berupa rekonsiliasi. Namun nampaknya permasalahan ini tidak juga menemukan ujungnya. Walaupun begitu, dengan Bergeraknya komunitas-komunitas sosial bahkan pers, hingga pada saat ini, yang tetap menjunjung HAM, terutama yang tidak melupakan kasus kasus masa lalu, diharapkan bisa dijadikan sebagai strategi komunikasi yang dapat mem-framing perkembangan kasus, yang terus mendorong hingga sampai pada akhir penyelesaian kasus.

Kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada tahun 1998 menjadi sebuah peristiwa sejarah yang sangat kelam. Pasalnya dalam peristiwa tersebut banyak yang mengalami kerugian baik kerugian secara fisik, materi, maupun psikologis. Kerusuhan yang secara tidak langsung dimanfaatkan bagi sebagian kalangan untuk kepentingan politik menimbulkan adanya anti-Tionghoa yang berkembang pada kehidupan bermasyarakat. Dalam menanggapi masalah tersebut pemerintah memilih untuk diam entah untuk melindungi para pelaku yang terlibat atau supaya pelaku terbebas dari hukuman. Pembungkaman terhadap peristiwa ini ditunjukan dengan tidak adanya penyelidikan lebih lanjut yang berkaitan dengan berapa jumlah pasti yang terdampak, siapa pelaku dibalik kerusuhan ini, bahkan keadilan maupun ganti rugi yang seharusnya didapatkan tidak ada yang mengungkap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Zed, Mestika.2003.*Metode Penelitian Kepustakaan*.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
Efendi, Akhmad (2010). Munaji, Usman, ed. *Perkembangan Pers di Indonesia*.
Jakarta Barat: CV. Pamularsih. ISBN 978-979-053-128-4.

Jurnal:

Azi,Santoso.2021.*Dampak Kerusuhan Mei 98 Terhadap Perekonomian Masyarakat Etnis Tionghoa Di Surakarta*. Skripsi. STKIP PGRI Pacitan.
Aryanto,Putro Yahya, Tri,Atmaja Hamdan dan Ibnu.2017.*Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa Di Surakarta Tahun 1972-98*.Journal Of Indonesian History,Vol.6 No.1.
Ahmad, Sufmi Dasco (2018). *Politik, Media Massa, dan Kebohongan* (PDF).
Anggraeni, Sandra (2022). *Kekerasan Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa Dalam Kerusuhan Mei 1998 Di Surabaya*. E-Journal Pendidikan Sejarah, Vol.12 No.1. Surakarta: UNS Press. ISBN 978-602-397-209-8.

Hutahaeen, Juliandry (2014). *Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Pengusaha Etnis Tionghoa Di Petukangan Jakarta Tahun 1998-2003*. Journal Of Indonesia History, Vol.3 No.1.

Julian,Hutahaeen.2014.*Dampak Kerusuhan Mei 98 Terhadap Pengusaha Etnis Tionghoa Di Petukangan Jakarta Tahun 1988-2003*.Journal Of Indonesia History, Vol.3, No.1, Hlm.27-33.

Keller, Anett (2009). *Tantangan dari Dalam: Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional:Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika* (PDF). Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Office.

Sandra,Anggraeni.2022.*Kekerasan Terhadap Etnis Tionghoa Dalam Kerusuhan Mei 98 Di Surabaya*.Jurnal Pendidikan Sejarah,Vol.12,No.1.

Artikel:

Madrim,Sasmito,(2022).24 Tahun Tragedi Mei 1998: Relawan Terus Perjuangkan Hak Korban Pemerkosaan. Link:<https://www.voaindonesia.com/a/tahun-tragedi-mei-1998-relawan-terus-perjuangkan-hak-korban-pemerkosaan-/6574054.html> Diakses: 25 Mei 2023.

Susilo, Wahyu (2019). *Habibie dan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Link: [Habibie dan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan – DW – 13.09.2019](#). Diakses: 4 Mei 2023.